

LAPORAN KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PELAIHARI
2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah – Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran Strategis dengan beberapa kendala, serta langkah perubahan kedepan.

Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis capaian indicator kinerja utama (IKU) serta komponennya.

Capaian kinerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2025.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh pegawai yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta informasi dalam mewujudkan good governance dan clean governance

Pelaihari, 2 Februari 2026

Kepala Dinas,



MUH. KUSRI, SP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690315 199803 1 012



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	4
E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	13
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	15
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya ...	19
I. Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
A. Visi RPJMD	24
B. Misi RPJMD	25
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	26
D. Strategi dan Arah Kebijakan	29
E. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	34
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	34
2. Analisa Capaian Kinerja	35
B. Akuntabilitas Keuangan	82
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Strategi Peningkatan Kinerja	97
LAMPIRAN	
Lampiran 1	
Lampiran 2	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.





D. Cascading Kinerja

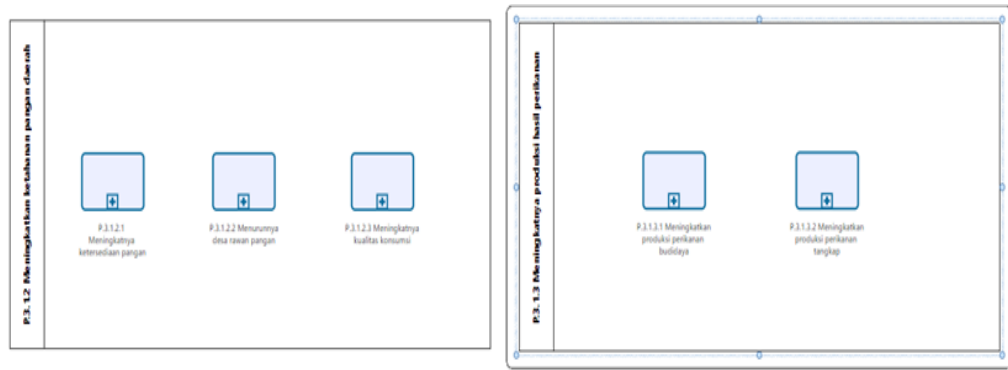
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

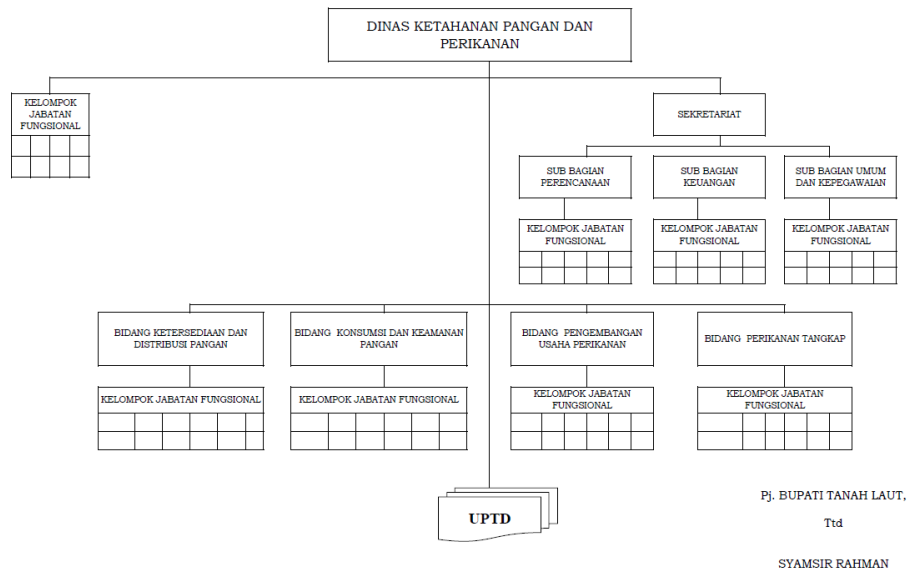
DKPP	 <p>P.3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan</p>
P.3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penguatan Kemiskinan	 <p>P.3.1 Meningkatnya sektor ekonomi unggulan daerah</p>
P.3.1 Meningkatnya sektor ekonomi unggulan daerah	 <p>P.3.1.2 Meningkatkan ketahanan pangan daerah</p>  <p>P.3.1.3 Meningkatnya produksi hasil perikanan</p>



Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan ketahanan pangan dan urusan perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang ketahanan pangan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah, yakni:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - 1) perumusan kebijakan teknis Bidang ketahanan pangan dan perikanan
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang ketahanan pangan dan perikanan
 - 3) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,

- distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - 5) pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - 6) pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - 7) pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - 8) pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan
 - 10) pelaksanaan administrasi dinas
 - 11) pembinaan UPTD Dinas

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi:
 - a. ketatausahaan;
 - b. administrasi dan kebutuhan rumah tangga;
 - c. kehumasan dan keprotokolan;
 - d. kepegawaian;
 - e. keuangan;
 - f. perencanaan program;
 - g. pengumpulan data;
 - h. penyusunan laporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada Bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 3) penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di Bidang ketahanan pangan dan perikanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
- 6) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- 7) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 8) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- a. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan:
 1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;
 2. pemberian pendampingan; dan

3. pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan perencanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - 2) penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
 - 3) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - 4) penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - 5) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - 6) penyiapan pemantapan program di Bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 9) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan Renja Bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - 2) penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - 3) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di Bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - 4) penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - 5) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - 6) penyiapan pemantapan program di Bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
 - 10) langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

- a. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang pengembangan usaha perikanan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang pengembangan usaha perikanan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan Renja Bidang pengembangan usaha perikanan;
- 2) perumusan kebijakan Bidang pengembangan usaha perikanan;
- 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang pengembangan usaha perikanan;
- 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang pengembangan usaha perikanan;
- 5) pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
- 6) pelaksanaan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- 7) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan usaha perikanan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap.
- b. Untuk melaksanakan tugas perikanan tangkap mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan Renja Bidang perikanan tangkap;
 - 2) perumusan kebijakan bidang Bidang perikanan tangkap;
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang perikanan tangkap
 - 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang perikanan tangkap

- 5) pelaksanaan kebijakan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan
- 6) pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan
- 7) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang perikanan tangkap
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan;
2. Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
3. Minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan;
4. Belum optimalnya pembentukan kelembagaan untuk nelayan;
5. Belum optimalnya akses permodalan pada sektor perikanan;
6. Masih kurangnya Sarana Prasarana bidang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut;
7. Masih Kurangnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terkait ketahanan pangan;

8. Belum beragamnya pola konsumsi ketahanan pangan Masyarakat;
9. Keterbatasan kemampuan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan dan gizi.

Dari beberapa permasalahan yang timbul dan isu strategis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
usaha budidaya ikan (KJA, Kolam Ikan, Tambak)	Kurang Optimalnya sarana prasarana Perikanan Tangkap dan Illegal Fishing, serta destructive fishing	Peningkatan aktivitas dari hulu (pertambangan dan perkebunan) berdampak pada kualitas air	Kerusakan lingkungan	Deforestasi dan pembangunan yang tidak terencana	pembukaan lahan baru untuk tambang dan perkebunan	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan
usaha penangkapan ikan (perairan umum dan laut)	Belum optimalnya pemanfaatan lahan sektor perikanan dan sarana prasarana pengembangan usaha perikanan	Kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan	Perubahan iklim berakibat peningkatan suhu global	perubahan pola curah hujan menyebabkan banjir dan kekeringan ekstrem	terganggunya produksi pertanian dan perikanan	Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan bagi nelayan dan pembudidaya ikan
						Minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan
						Belum optimalnya pembentukan kelembagaan untuk nelayan
						Belum optimalnya akses permodalan pada sektor perikanan
Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Belum terpenuhi sarana prasarana Ketahanan Pangan	Peningkatan sumberdaya manusia dan ekonomi hijau	Menuju ketahanan pangan berkelanjutan	Pencapaian swasembada pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Masih kurangnya Sarana Prasarana bidang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut

	Belum optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)		Krisis pangan, rendahnya diversifikasi pangan, malnutrisi, dan food loss and waste	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU), Angka Stunting pada Balita	Penurunan Keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat karena konsumsi pangan bergizi seperti sayuran, buah dan protein hewani, dan upaya peningkatan konsumsi pangan non beras berbahan sumber daya pangan lokal	Masih Kurangnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terkait ketahanan pangan
						Belum beragamnya pola konsumsi ketahanan pangan Masyarakat
						Keterbatasan kemampuan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan dan gizi

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 38 orang yang terdiri dari 22 PNS, 4 PPPK penuh waktu dan 12 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1

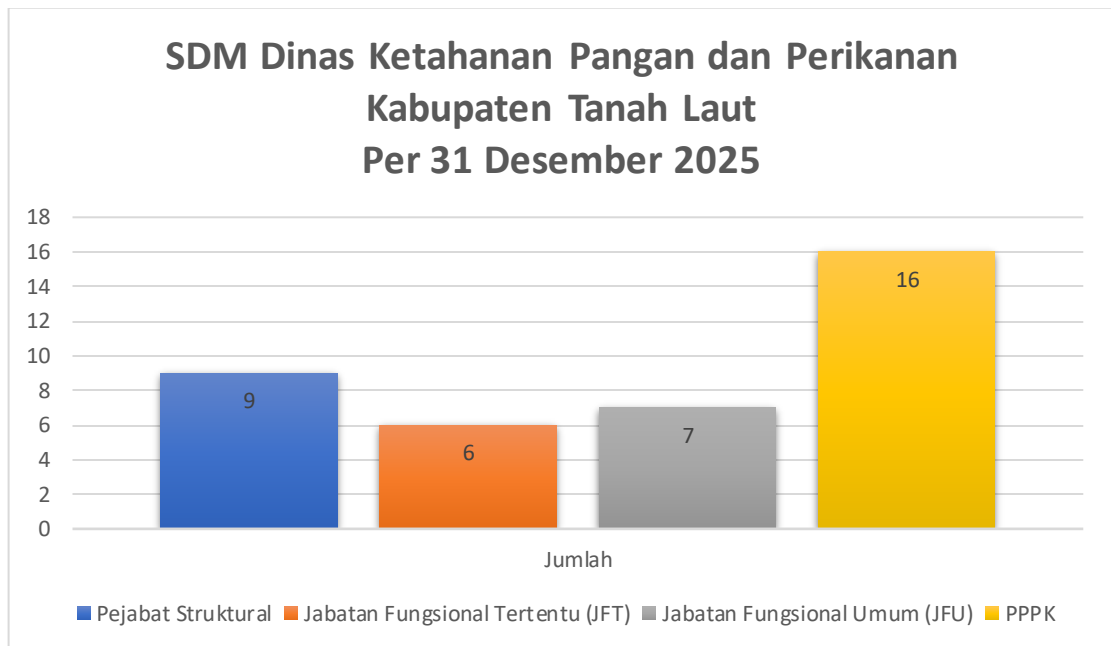
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
7	13	2	-	16	38	4	22	3	-	7	1	1	38

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai peta jabatan adalah 149 (seratus empat puluh sembilan) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 38 (tiga puluh delapan) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 9 Pejabat struktural, 6 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 7 orang fungsional umum (JFU) dan 16 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 38 pegawai negeri sipil.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut juga didukung

dengan sarana prasarana 825 unit peralatan, 1 unit gedung kantor, mushalla dan 2 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 5 unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua 20 unit.

Tabel

Program, kegiatan dan Pagu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.755.349.471,67
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.528.0`96,40
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.285.190.729,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.709.085,27
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.505.941,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.267.620,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.148.000,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	601.267.718,00
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	601.267.718,00
III	ROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.235.788.693,76

	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	89.460.264,08
	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	909.335.145,00
	3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	236.993.284,68
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		26.300.588,56
	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.300.588,56
V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		163.746.936,49
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	163.746.936,49
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1.678.388.396,39
	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.524.708.952,00
	2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	153.679.444,39
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		752.108.076,00
	1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	49.475.848,00
	2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	702.632.228,00
VIII	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		651.477.816,52

	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	42.699.904,00
IX	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		108.012.198,32
	1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	108.012.198,32
JUMLAH			11.972.439.895,71

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/249 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

N o.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Keterangan
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan	melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala atas rencana aksi tindak lanjut (RATL)	4 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Kepala Dinas (Tim penyusun Laporan)	Laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

	memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan					
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra Tahun 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah	Perbaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan capaian tahun sebelumnya	2 Dokumen	Juli- Oktober 2025	Sekretaris (Kasubbag Perencanaan dan Anggaran)	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025 - 2029
3	Agar pimpinan secara konsisten memberikan umpan balik dalam penilaian	Pimpinan memberikan umpan balik dalam bentuk narasi pada SKP bulanan	6 Dokumen	Juli sd. Desember 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubbag	Dokumen SKP Bulan Juli - Desember 2025

	SKP bulanan dalam bentuk narasi yang memuat analisis capaian kinerja, hambatan, serta faktor pendukung	yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya				pejabat struktural lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
4	Agar kedepannya laporan kinerja memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lainnya	Menyusun laporan kinerja yang memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lainnya	1 Dokumen	Januari 2026	Sekretaris (Kasubbag Perencanaan dan Anggaran)	Laporan Kinerja Tahun 2025
5	Kedepannya untuk Tahun 2025 agar tertib membuat laporan kinerja setiap triwulan	Menyusun laporan kinerja triwulan	4 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Kepala Dinas (Tim penyusun Laporan) TU dan Kepegawaian	Laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

6	Agar kedepannya dokumen laporan kinerja memuat tindaklanjut atas LHE AKIP tahun sebelumnya	Menyusun laporan kinerja yang memuat tindaklanjut atas LHE AKIP tahun sebelumnya	1 Dokumen	Januari 2026	Sekretaris (Kasubbag Perencanaan dan Anggaran)	Laporan Kinerja Tahun 2025
---	--	--	-----------	--------------	--	----------------------------

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP



Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai mitra strategis dan fasilitator yang efektif bagi Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Peran ini diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan daerah (Perda,

Ranperda) serta penyediaan dukungan administratif, analisis dan teknis yang profesional pada sektor ketahanan pangan dan perikanan. Dengan dukungan yang cepat, responsif dan akurat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat memberikan daya dukung yang kuat bagi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD. Hal ini pada akhirnya akan mendorong seluruh proses pembangunan daerah agar berjalan tertib, aspiratif dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan masa depan pada sektor ketahanan pangan dan perikanan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan khususnya pada sektor ketahanan pangan dan perikanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 2 “Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyingkapan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.



Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maka, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan termasuk dalam mendukung tujuan kedua yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan sasaran yaitu Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah adalah Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat dan Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah		Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76
	1.	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	80,59	81	82	82	83	83	83
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,14	4	3,8	3,8	3,6	3,6	3,5
	2.	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	2,95	2,5	3,1	3,2	3,2	3,4	4,0

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	Komponen : Ketersediaan Pangan 30%, Keterjangkauan Pangan 35%, Pemanfaatan Pangan 35%
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Komponen : 1. Fungsi kepadatan probabilitas (PDF) dari asupan energi harian masyarakat 2. Kebutuhan Energi Minimum 3. Tingkat konsumsi energi harian individu
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tahun } n - 1} \times 100$

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam

upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.4

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
	ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Peningkatan Ketersediaan pangan dan Hasil Perikanan, serta pengembangan pertanian dan keberagaman pangan lokal

Tabel 2.5

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Tanah Laut	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Peningkatan Aksesibilitas dan Stabilitas Harga Pangan	
			Peningkatan Mutu, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan Olahan	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	
			Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	81	Kepala DKPP
		2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4	Kepala DKPP
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	1	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	2,5	Kepala DKPP

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 5.217.090.424,04. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	601.267.718,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.235.788.693,76
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	26.300.588,56
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	163.746.936,49
JUMLAH			2.027.103.937,81
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.678.388.396,39
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	752.108.076,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	651.477.816,52
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	108.012.198,32
JUMLAH			3.189.986.487,23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029 terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,92%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	81	79,90	98,64%	Sangat Tinggi
		2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4	3,27	122,32	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	1	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan (%)	2,5	1,88	75,2	Sedang
Rata-Rata Capaian 2025						86,92	Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 3 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i></p> <p>Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.</p>	<p>Realisasi</p> <p>----- X 100%</p> <p>Target</p>
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i></p>	<p>Target</p> <p>----- X</p> <p>100%</p> <p>Realisasi</p>
	<p><i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i></p>	<p>Target</p> <p>----- X</p> <p>100%</p> <p>Realisasi</p>
	<p>Contoh: angka kemiskinan, angka kematian</p>	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1**Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah**. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Nilai	16,47

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat
- 2) Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1**Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat**

Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,06	83,45	80,59	81	79,90	98,64%
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	3,61	4,06	4,14	4	3,27	122,32%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									110,48%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81	79,90	98,64%	83	99,49%
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	4	3,27	122,32	3,5	100%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Balangan	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,18	86,42	77,00	81,98	73,00
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	2,48	3,71	3,53	4,02	7,89

a. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

INDEKS KOMPOSIT

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerantanan Pangan (FSVA) dibangun dari beberapa indikator yang terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Data indikator FSVA Kabupaten dengan level desa berasal dari lintas sektor. Metode indeks gabungan (komposit) digunakan untuk merangkum data dari 8 indikator kerentanan pangan sehingga menjadi kesimpulan umum yang berguna dalam pengambilan kebijakan.

Penghitungan Indeks Komposit masing-masing wilayah (Kecamatan) dilakukan dengan rumus:

$$Y_j = a_1X_{1j} + a_2X_{2j} + \dots + a_5X_{5j} + a_6X_{6j}$$

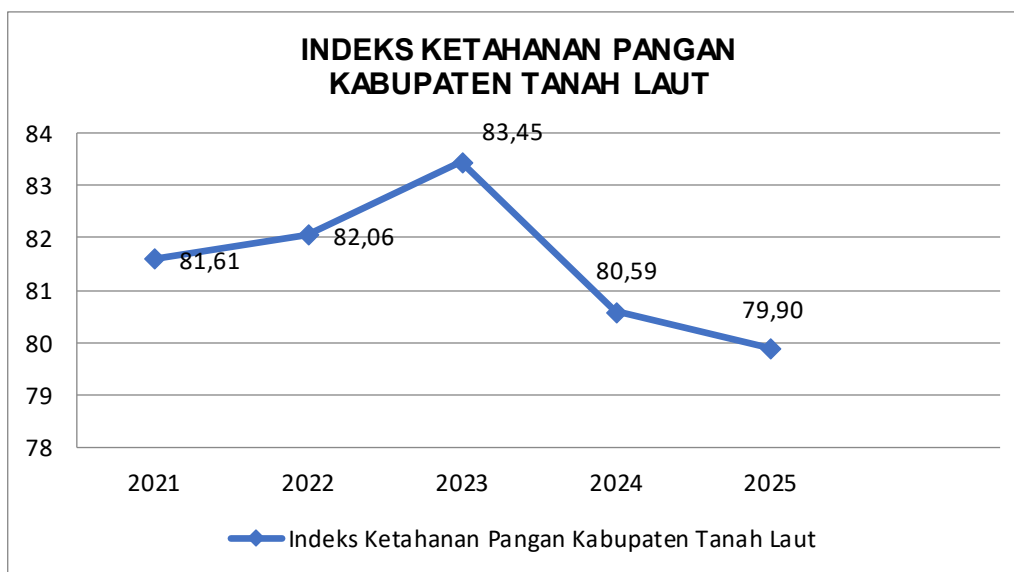
Ket: Y_j : Indeks komposit desa ke-j

a_1, a_2, \dots, a_6 : Bobot masing-masing indikator

$X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{6j}$: Nilai masing-masing indikator pada kecamatan ke-j

Grafik 3.1.2

Indeks Ketahanan Pangan 2021 – 2025

**1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah (Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tanah Laut) pada tahun 2025 mencapai skor 79,90. Meskipun secara angka skor ini menunjukkan performa yang sangat baik (kategori Tahan), terdapat penurunan tipis jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 80,59. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika indikator penyusun IKP pada aspek akses dan pemanfaatan pangan di beberapa desa yang mengalami pergeseran status kerentanan, selain itu pada tahun 2025 perhitungan untuk IKP mengalami perubahan menjadi 12 (dua belas indikator) metode FSVA, sedangkan pada tahun 2024 perhitungan IKP menggunakan 9 (sembilan) indikator metode FSVA.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, realisasi skor IKP Tanah Laut berada pada angka 79,70. Jika disandingkan dengan target perencanaan strategis yang ditetapkan sebesar 81, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memenuhi target kinerja sebesar 98,64%. Capaian ini mengukuhkan posisi Tanah Laut sebagai wilayah dengan klasifikasi "Sangat Tahan" (Prioritas 6).

Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dan 2024 secara keseluruhan, kondisi ketahanan pangan Tanah Laut menunjukkan stabilitas yang terjaga. Dibandingkan dengan periode

sebelumnya (2023), terdapat konsistensi pada pilar Ketersediaan yang tetap menjadi kontributor skor tertinggi (88,07). Namun, terdapat dinamika pada pilar Keterjangkauan dan Pemanfaatan yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi pasca-pandemi dan tantangan angka stunting. Meskipun demikian, tetap mampu dipertahankan di level "Sangat Tahan", membuktikan bahwa kebijakan mitigasi pangan daerah berjalan efektif.

Analisis Tren Jangka Menengah (Beberapa Tahun Terakhir) Jika meninjau tren dalam beberapa tahun terakhir, performa IKP Kabupaten Tanah Laut menunjukkan grafik yang cenderung stabil dengan fluktuasi minor yang terkendali:

- Kekuatan Pilar Produksi: Konsistensi produksi pangan lokal (beras dan jagung) selama 3 tahun terakhir memastikan bahwa rasio ketersediaan pangan terhadap jumlah penduduk selalu berada pada zona aman.
- Transformasi Infrastruktur Dasar: Terdapat tren peningkatan yang signifikan pada indikator akses air bersih dan listrik jika dibandingkan dengan data 3-4 tahun lalu. Keberhasilan mencapai cakupan layanan dasar yang hampir merata ini menjadi "bantalan" bagi skor IKP saat indikator ekonomi mengalami tekanan.
- Tantangan Persisten: Dalam beberapa tahun terakhir, indikator "Persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65%" masih menjadi tantangan yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pangan tersedia secara fisik, daya beli masyarakat terhadap fluktuasi harga global tetap menjadi variabel yang paling memengaruhi dinamika skor dari tahun ke tahun.

Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Pusat-Daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem pangan yang resilien dan berkelanjutan. Sinergi dan kolaborasi dalam konsep pentahelix perlu diaktualisasikan dalam implementasi program dan kegiatan ketahanan pangan yang direkomendasi. Kerja sama antarbidang dan antarpihak dari unsur Academic, Business, Community, Government, dan Media (ABCGM) akan mampu mengoptimalkan dukungan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya alam, sumber dana dan sumber daya manusia dalam menangani kerawanan pangan dan mencapai target SDGs, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan). Upaya dalam rangka untuk pencapaian target sesuai proyeksi komposit IKP Kabupaten tanah Laut Tahun 2026 sebesar 82,19. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan



konsistensi semua pihak dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan regulasi ketahanan pangan, dukungan anggaran yang berkelanjutan, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi dan program inovatif untuk menangani kerawanan pangan

3) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

IKP Nasional disusun mulai tahun 2025 dan menjadi indikator kinerja di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 Prioritas Nasional-2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru) Berdasarkan perhitungan, capaian IKP Nasional Tahun 2025 sebesar 73,00 dengan rincian untuk aspek ketersediaan pangan memiliki skor sebesar 61,47; aspek keterjangkauan pangan memiliki skor sebesar 82,70; dan aspek pemanfaatan pangan memiliki skor yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebesar 74,99.

Capaian skor IKP kabupaten Tanah Laut sebesar 79,90 ini masih berada dalam jalur yang positif terhadap target jangka menengah Organisasi. Dalam dokumen proyeksi IKP 2025-2029, Kabupaten Tanah Laut ditargetkan untuk tetap menjaga konsistensi di angka 80-an. Capaian saat ini menunjukkan efektivitas program DKPP dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan di tingkat daerah, meski diperlukan intervensi lebih kuat.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 79,90, Jika dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang mencatat indeks sebesar 86,42, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 6,52 poin. Capaian Balangan menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa kualitas IKP di kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang memperoleh nilai sebesar 81,98, Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yang lebih signifikan, yaitu sebesar 2,08 poin.

Rincian IKP Prov. Kalsel Tahun 2025

Kode Kab	Nama Kab	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT
6301	Tanah Laut	88.07	85.81	65.90	79.90
6302	Kotabaru	86.30	85.75	74.64	82.21
6303	Banjar	93.65	88.91	71.61	84.70
6304	Barito Kuala	87.21	88.95	77.18	84.42
6305	Tapin	80.30	88.39	79.19	82.60
6306	Hulu Sungai Selatan	95.97	84.17	73.52	84.56
6307	Hulu Sungai Tengah	96.08	84.74	76.17	85.67
6308	Hulu Sungai Utara	82.13	83.35	73.79	79.74
6309	Tabalong	91.33	84.83	79.51	85.23
6310	Tanah Bumbu	89.59	90.41	69.65	83.18
6311	Balangan	93.48	86.02	79.76	86.42
6371	Kota Banjarmasin	64.44	83.74	82.28	76.78
6372	Kota Banjarbaru	63.26	84.47	83.37	77.00

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Balangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan indeks Ketahanan Pangan. Meskipun berada di peringkat menengah di tingkat provinsi, capaian Tanah Laut masih jauh melampaui Rata-rata IKP Nasional yang berada di angka 73,00.

5) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan “Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat”, dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyampaikan bahwa :

- Penurunan dari IKP Tahun 2024 sebesar 82,14 menjadi 79,90 Tahun 2025 disebabkan oleh Penyelarasan dengan FSVA Nasional dimana dalam penyusunan FSVA tahun 2024 dan sebelumnya menggunakan metode lama yang menggunakan 6 indikator sementara penyusunan FSVA Tahun 2025 metode baru menggunakan 11 indikator.
- Tahun 2025 adalah Tahun dasar/baseline penetapan target RPJMD
- Masih adanya 14 desa (10,37%) yang masuk dalam kategori rentan pangan (Prioritas 1-3). Namun sudah tidak ada lagi terdapat wilayah / desa yang masuk dalam prioritas 1 (sangat rentan).

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa BPS	Kode Desa Kemedagri	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERING KAT	PRIO KOMP
1	BUMI MAKMUR	6301031	6301031001	63.01.11.2005	PANTAI HARAPAN	1	3	1	3	1	4	43,40	135	2
2	KINTAP	6301030	6301030014	63.01.07.2005	RIAM ADUNGAN	1	2	1	4	5	1	54,29	134	3
3	TAKISUNG	6301020	6301020009	63.01.01.2009	BATILAI	5	1	1	4	2	3	54,47	133	3
4	JORONG	6301080	6301080001	63.01.02.2001	SABUHUR	3	3	1	4	4	1	55,00	132	3
5	PELAIHARI	6301060	6301060026	63.01.03.2024	AMBUNGAN	4	3	1	4	3	2	56,19	131	3
6	BUMI MAKMUR	6301031	6301031002	63.01.11.2004	SUNGAI RASAU	1	2	1	4	3	3	56,74	130	3
7	PANYIPATAN	6301010	6301010003	63.01.06.2004	KANDANGAN LAMA	4	1	1	4	3	4	57,83	129	3
8	BATH-BATI	6301040	6301040009	63.01.05.2006	BENTOK DARAT	3	2	1	4	4	1	58,15	128	3
9	TAMBANG ULANG	6301050	6301050010	63.01.08.2009	MARTADAH BARU	2	3	1	4	4	1	59,27	127	3
10	KURAU	6301030	6301030009	63.01.04.2006	HANDIL NEGARA	5	3	1	4	1	4	59,33	126	3
11	BUMI MAKMUR	6301031	6301031006	63.01.11.2007	HANDIL GAYAM	5	3	1	4	1	5	59,43	125	3
12	TAMBANG ULANG	6301050	6301050001	63.01.08.2005	BINGKULU	3	3	1	4	4	3	59,71	124	3
13	KINTAP	6301030	6301030002	63.01.07.2007	SALAMAN	1	1	1	4	4	1	60,27	123	3
14	JORONG	6301080	6301080002	63.01.02.2005	SWARANGAN	4	3	1	4	4	1	60,41	122	3

Hasil perhitungan IKP Kabupaten Tanah Laut 8 indikator untuk wilayah Kabupaten yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan menempatkan Kabupaten Tanah Laut dengan nilai IKP Tahun 2021 sebesar 81,61, IKP Tahun 2022 sebesar 82,06, IKP Tahun 2023 sebesar 83,45 dan IKP Tahun 2024 sebesar 80,59 kemudian Tahun 2025 sebesar 79,90. Hasil data ini menunjukkan bahwa nilai IKP tahun 2024 lebih rendah dibandingkan nilai IKP tahun 2023 kemudian Tahun 2025 turun lagi sebesar 79,90, namun nilai masih masuk dalam kategori > 75,68 artinya tahan pangan. Nilai komposit IKP Kabupaten Tanah Laut dari penjumlahan 8 indikator dengan pembobotan didasarkan pada penilaian kemudian dilakukan pemeringkatan prioritas tingkat kerentanan pangan. Wilayah yang masuk ke dalam prioritas 1 adalah wilayah yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada wilayah dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada prioritas 6 merupakan wilayah yang memiliki ketahanan pangan baik.

Untuk membentuk klasifikasi, maka digunakan metode konversi yang digunakan dalam penilaian ketahanan pangan. Penilaian perindikator didasarkan pada klasifikasi penilaian komposit sebagai berikut :

Tabel 3.2.39
 Nilai Komposit dan Prioritas IKP Kabupaten Tanah Laut

Prioritas	Penilaian Komposit
1	<= 41,52
2	> 41,52 – 51,42
3	> 51,42 – 59,58
4	> 59,58 – 67,75
5	> 67,75 – 75,68
6	> 75,68

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Kinerja (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAAN PANGAN				
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	601.267.718	100	577.098.000	95,98
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	169.091.320	100	147.755.000	87,38
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	432.176.398	100	429.343.000	99,34
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	89.460.264	100	73.376.100	82,02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	45.654.546	100	40.721.000	89,19
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	43.805.718	100	32.655.100	74,55
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	909.335.145	100	369.826.150	40,67
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	857.190.000	50	341.282.250	39,81
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52.145.145	100	28.543.900	54,74
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.300.589	100	19.756.000	75,12
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	26.300.589	100	19.756.000	75,12

Pada akhir tahun 2025 sisa stok opname cadangan pangan pemerintah adalah sejumlah 24.790 kg beras. Diharapkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak bencana, baik bencana alam maupun non alam.





Dokumentasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025

Sedangkan untuk lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2025 berjumlah 45 buah dengan jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat yang masih aktif dan bangunan dalam kondisi baik yaitu sebanyak 37 buah. Pembangunan lumbung Tahun 2025 dilaksanakan di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung sebanyak 1 unit yaitu Gapoktan Maju Bersama dengan menggunakan dana APBD Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.



Dokumentasi Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2025

Dalam kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten / kota bukan hanya infrastruktur fisik saja tetapi ada pendukung kemandirian pangan berupa Hibah pengadaan Mesin Rice Milling Unit untuk Kelompok Tani Lestari Desa Lok Serapang Pelaihari



Selain itu dalam sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik di tahun 2025 dilaksanakan hibah pengisian gabah di 5 Kelompok, yakni :

1. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Berkat Rakat Mufakat, Desa Padang Kecamatan Bati-bati sebanyak 2 ton gabah.



2. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Laras Banua, Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati sebanyak 2 ton gabah.



3. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Maju Beimbai, Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 2 ton gabah.



4. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Karya Baru, Desa Batakan Kecamatan Panyipatan sebanyak 2 ton gabah.



5. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Karya Mandiri, Desa Panggung Kecamatan Pelayari sebanyak 2 ton gabah.



Diharapkan dengan adanya bantuan pengisian gabah tersebut, anggota kelompok juga aktif menjalankan tabungan gabah yang dapat dijalankan untuk usaha ekonomi produktif, yakni simpan pinjam maupun tunda jual. kelompok dapat mengupayakannya untuk kegiatan produktif, dan masyarakat juga merasa aman

pada saat kondisi rawan pangan karena memiliki cadangan pangan di dalam lumbung pangan.



Dokumentasi Sosialisasi Pengisian Gabah diKelompok Lumbung Pangan Masyarakat Maju Beimbai, Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang



Dokumentasi Sosialisasi Pengisian Gabah diKelompok Karya Baru Desa Batakan Kec. panyipatan



Dokumentasi Sosialisasi Pengisian Gabah diKelompok Lumbung Pangan Berkat Rakat Mufakat Desa Padang Kec. Bati-bati



Dokumentasi Sosialisasi Pengisian Gabah diKelompok Karya Mandiri Desa Panggung Kec. Pelaihari



Dokumentasi Sosialisasi Pengisian Gabah diKelompok Lumbung Pangan Laras Banua
Desa Benua Raya Kec. Bati-bati

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*.

Indikator Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam

mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten Tahun 2025 menggunakan metode baru yang terdiri dari 11 indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Berikut adalah tabel rincian **11 Indikator FSVA (Metode Baru)** yang digunakan dalam penyusunan IKP Kabupaten Tanah Laut, lengkap dengan definisi operasional dan sumber datanya:

Tabel Indikator Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota

No.	Aspek	Indikator	Definisi	Sumber Data
1.	Ketersediaan	Rasio Konsumsi terhadap Produksi Bersih	Perbandingan antara kebutuhan pangan penduduk (padi, jagung, ubi-ubian) dengan hasil produksi lokal setelah dikurangi susut/pakan.	DISTANHORBUN TALA
2.	Ketersediaan	Persentase Luas Lahan Pertanian	Proporsi luas lahan baku sawah atau lahan produktif dibandingkan dengan total luas wilayah kabupaten.	DISTANHORBUN TALA
3.	Keterjangkauan	Persentase Penduduk Miskin	Proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	BPS (Susenas)
4.	Keterjangkauan	Proporsi Pengeluaran Pangan > 65%	Persentase rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya (>65%) hanya untuk makan (indikator kerentanan ekonomi).	BPS (Susenas)
5.	Keterjangkauan	Desa tanpa Akses Penghubung	Desa/Kelurahan yang tidak memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.	BPS (Podes)
6.	Keterjangkauan	Rasio Toko/Warung Sembako	Ketersediaan sarana perdagangan pangan	BPS (Podes)

			(pasar/toko/warung) per 1.000 penduduk untuk menjamin akses fisik.	
7.	Pemanfaatan	Rumah Tangga tanpa Akses Listrik	Persentase rumah tangga yang belum memiliki sumber penerangan listrik baik dari PLN maupun non-PLN.	BPS (Podes) / PLN
8.	Pemanfaatan	Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak (perpipaan, sumur terlindungi, dll).	BPS (Susenas/Podes)
9.	Pemanfaatan	Rasio Tenaga Kesehatan	Perbandingan jumlah dokter/bidan/perawat dengan jumlah penduduk guna menjamin kualitas kesehatan masyarakat.	Dinas Kesehatan 2024
10.	Pemanfaatan	Prevalensi Stunting	Persentase anak balita dengan tinggi badan rendah menurut umur yang mencerminkan kekurangan gizi kronis.	Dinas Kesehatan 2024
11.	Pemanfaatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir (indikator derajat kesehatan umum).	BPS

Tabel Indikator FSVA Kabupaten Tahun 2025

Hasil analisis FSVA tahun 2025 menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Laut terdapat 121 desa atau 89,63 % desa yang tahan pangan dan 14 desa atau 10,37 % dari 135 desa yang rentan terhadap kerawanan pangan. Dengan persentase tersebut merupakan suatu tantangan bagi Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang tahan terhadap kerentanan pangan. Dari 135 desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 14 desa yang termasuk desa rentan rawan pangan, dengan rincian; 1 desa (0,74%) desa berwarna merah sedang atau termasuk prioritas 2 (rentan sedang) dan 13 desa (9,63 %) desa berwarna merah muda atau prioritas 3 (rentan rendah) terhadap kerawanan pangan.

Sedangkan 121 desa lainnya atau sebanyak 89,63 % yang berwarna hijau muda – hijau tua yaitu prioritas 4,5 dan 6 termasuk desa yang relative tahan terhadap kerawanan pangan pada desa yang bersangkutan.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 pada Tahun 2025 tidak terdapat lagi di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan yang mempunyai desa rentan pangan di Prioritas 2– 3 adalah berada di Kecamatan Bumi Makmur (3 desa), Kecamatan Jorong (2 desa), Kecamatan Kintap (2 desa), Kecamatan Bati-bati (1 desa), Kecamatan Pelaihari (1 desa), Kecamatan Kurau (1 Desa), Kecamatan Panyipatan (1 desa), Kecamatan Takisung (1 desa), dan Kecamatan Tambang Ulang (2 desa). Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 berada di Desa Pantai Harapan (Kecamatan Bumi Makmur). Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 terdapat pada 13 desa yang masuk dalam kategori Prioritas 3 (Cukup Rentan), di antaranya adalah : Desa Riam Adungan dan Salaman (Kecamatan Kintap), Desa Batilai (Kecamatan Takisung), Desa Sabuhur dan Swarangan (Kecamatan Jorong), Desa Ambungan (Kecamatan Pelaihari), Desa Sungai Rasau dan Handil gayam (kecamatan Bumi Makmur), Desa Kandangan Lama (kec. Panyipatan), Desa Bentok Darat (Kecamatan Bati-bati), Desa Martadah baru dan Bingkulu (kecamatan Tambang Ulang) dan Desa handil Negara (Kecamatan Kurau). Secara umum desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 dan 3 disebabkan oleh :

1. Kemiskinan (Indikator Penduduk Tidak Sejahtera)

Ini adalah faktor yang paling krusial. Hampir seluruh desa di kategori Prioritas 2 dan 3 memiliki skor terendah (skor 1) pada indikator penduduk prasejahtera. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli rumah tangga untuk mengakses pangan bergizi meskipun pangan tersedia di pasar.

2. Keterbatasan Sarana Prasarana Pangan

Banyak desa rentan memiliki rasio toko, warung, atau pasar yang sangat minim dibandingkan jumlah penduduknya. Akibatnya, masyarakat harus menempuh jarak jauh atau membayar biaya transportasi lebih tinggi untuk mendapatkan kebutuhan pokok.

3. Kurangnya Akses Air Bersih dan Sanitasi

Masalah ini ditemukan sangat ekstrem di wilayah tertentu, terutama **Desa Pantai Harapan** (skor 1). Tanpa air bersih, pengolahan pangan menjadi tidak higienis, yang

kemudian memicu penyakit infeksi. Hal ini menghambat penyerapan gizi dalam tubuh (aspek pemanfaatan pangan).

4. Rendahnya Akses Tenaga Kesehatan

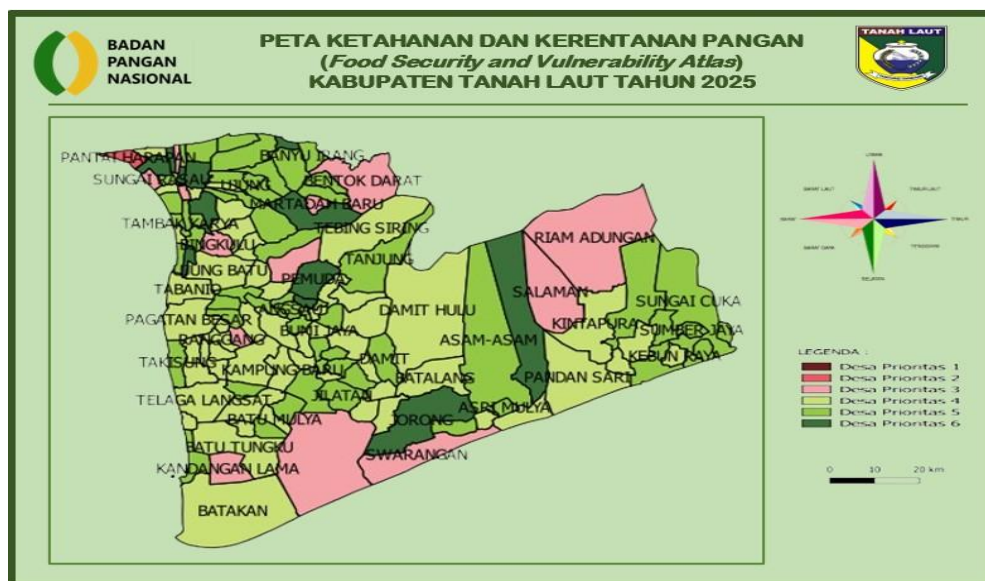
Beberapa desa memiliki keterbatasan akses terhadap tenaga kesehatan. Kurangnya pengawasan medis bagi kelompok rentan (balita dan ibu hamil) meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi kronis seperti stunting di desa-desa tersebut.

5. Keterbatasan Luas Lahan Pertanian

Faktor ini menjadi penyebab di beberapa desa. Rendahnya rasio lahan pertanian per kapita membuat desa tidak mampu memproduksi pangan secara mandiri dan sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

6. Infrastruktur Jalan dan Aksesibilitas

Meskipun secara umum sudah mulai membaik, beberapa desa masih terkendala akses jalan. Infrastruktur yang kurang memadai menghambat kelancaran distribusi pangan dan menyebabkan fluktuasi harga di tingkat desa.



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Tanah Laut Tahun 2025

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan juga Pemerintah Daerah terus melakukan upaya penanganan rawan pangan dan gizi serta mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah Prevalence of



Undernourishment (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Jumlah Penduduk Miskin (JPM) memiliki pengaruh terhadap Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan. Jumlah penduduk miskin (JPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Data menunjukkan ketika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar satu satuan akan menyebabkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat sebesar 1,59 persen. Sebaliknya jika jumlah penduduk miskin menurun sebesar satu satuan maka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurun sebesar 1,59 persen.

Artinya bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah maka akan mempengaruhi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Semakin banyak jumlah penduduk miskin akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat khususnya terhadap makanan, sehingga dapat menyebabkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan.

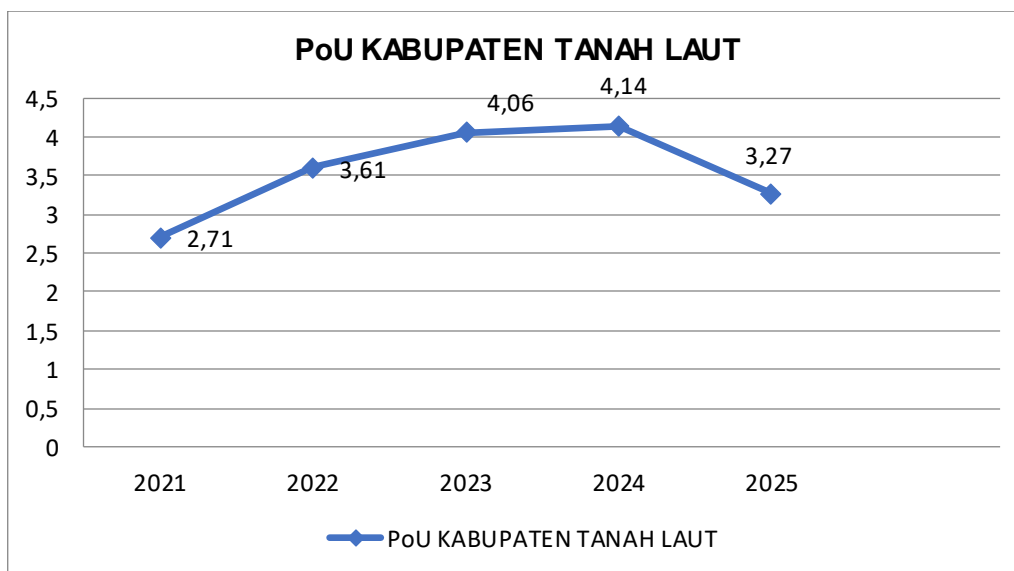
Fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin berkaitan erat dengan akses seseorang terhadap makanan. Maka dapat diartikan bahwa kemiskinan mengakibatkan penurunan akses penduduk terhadap makanan dalam memenuhi kecukupan energi serta nutrisi untuk dapat hidup aktif dan sehat. Dampak yang begitu besar dari kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama dari kerawanan pangan. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Tanah Laut, dimana prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurun berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Hal ini juga terjadi di beberapa tahun baik secara Nasional dan juga Provinsi Kalimantan Selatan, namun dengan angka yang tidak terlalu drastis. Hal ini dapat dilihat dalam data.

Pada Tahun 2024 angka PoU adalah 4,14 persen dan selanjutnya, pada tahun 2025 angka PoU kembali mengalami penurunan menjadi 3,27 persen atau turun sebesar 0,87 persen. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan stabilisasi harga pangan serta kenaikan efektivitas program bantuan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Peningkatan akses terhadap pangan tersebut berkontribusi pada membaiknya

konsumsi kalori masyarakat, sehingga mendorong penurunan angka undernourishment secara nasional.

Grafik 3.1.2

Capaian PoU Tahun 2021 – 2025



2) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)" pada tahun 2025 tercatat sebesar 3.27 persen, atau setara dengan 122,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 4 persen. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 4.14 persen.

Tren capaian dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 sebesar 2,71 persen dan terus menurun menjadi 3,61 persen pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh capaian sebesar 4,06 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan indikator tersebut.

6) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)" pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,27 persen, yang setara dengan 122,32% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 4 persen. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 3,5 persen, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai diatas 100% dari target akhir Renstra. Walaupun capain pada tahun 2025 telah melebihi dari target pada akhir renstra pada indikator ini, diharapkan capaian pada tahun berikutnya diharapkan akan lebih membaik.

7) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,27 persen. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang mencatat indeks sebesar 3,71 persen, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 0,44 poin. Capaian Balangan menunjukkan tingkat capaian yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) di kabupaten Tanah Laut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat capaian sebesar 4,02 persen, Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian, yaitu sebesar 0,75 poin.

8) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan "Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat", dengan indikator PoU, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan :

1. Stabilitas Harga Pangan: Kemampuan dalam menjaga inflasi bahan makanan (khususnya beras dan sumber protein) memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah tetap memiliki daya beli.

2. Peningkatan Konektivitas Logistik: Perbaikan infrastruktur jalan dan pelabuhan mengurangi biaya distribusi, sehingga ketersediaan pangan di wilayah terpencil menjadi lebih stabil.
3. Diversifikasi Pangan Lokal: Keberhasilan mendorong masyarakat mengonsumsi pangan non-beras (seperti sagu, jagung, atau umbi-umbian) mengurangi ketergantungan pada satu komoditas impor yang fluktuatif.
4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah: Memastikan stok stok penyangga (buffer stock) cukup untuk melakukan operasi pasar saat harga melonjak.
5. Pemanfaatan Lahan Pekarangan: Mendorong konsep "Rumah Pangan Lestari" di mana keluarga menanam sayuran atau beternak skala kecil untuk konsumsi mandiri.

kegiatan-kegiatan strategis Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam menurunkan angka PoU (Prevalence of Undernourishment) di Kabupaten Tanah Laut:

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
 - a) Peran terhadap PoU: Menjamin ketersediaan fisik pangan pokok (beras) di saat terjadi kerawanan pangan atau masa paceklik.
 - b) Aksi Nyata: Penyaluran bantuan beras bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien, sehingga asupan kalori mereka tetap terjaga di atas ambang batas minimal. Jumlah bantuan beras /beras yang dikeluarkan selama Januari – Desember 2025 adalah sebanyak 30,270 Ton. Dengan jumlah Stok CPP per 31 Desember 2025 sebesar 24,790 Ton .



2. Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan (Gerakan Pangan Murah)

- a) Peran terhadap PoU: Meningkatkan keterjangkauan ekonomi masyarakat terhadap pangan bergizi.
- b) Aksi Nyata: Pelaksanaan Operasi Pasar Bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta berpartisipasi dalam Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan oleh DISKOPDAG dengan menjual beberapa komoditas pangan dengan harga yang lebih rendah dari pasar, agar daya beli masyarakat meningkat sehingga kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi menjadi lebih



3. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

- a) Peran terhadap PoU: Mendekatkan akses pangan ke tingkat desa agar masyarakat memiliki cadangan pangan mandiri. Jumlah Lumbung Pangan di Tanah Laut sebanyak 45 buah dengan 37 Kelompok Lumbung pangan yang masih aktif dan Kondisi baik.
- b) Aksi Nyata: Pembinaan kelompok tani dalam mengelola lumbung desa agar stok pangan tetap tersedia sepanjang musim, membangun lumbung pangan dan hibah pengisian gabah serta hibah mesin RMU untuk mendukung kemandirian pangan di tingkat desa.



4. Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

- a) Peran terhadap PoU: Memberikan data presisi mengenai lokasi/desa yang memiliki indikator PoU tinggi (daerah rentan).
- b) Aksi Nyata: Penyusunan peta FSVA yang mengidentifikasi desa-desa Prioritas 1-3. Data ini digunakan untuk mengarahkan intervensi penanganan agar tepat sasaran kepada penduduk yang benar-benar rentan pangan. Dalam penyusunan peta FSVA ini melibatkan anggota Tim Penyusunan FSVA 2025 sebagai Tim Koordinasi dalam pengumpulan data.



5. Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan (CPP Pusat)

- a) Peran terhadap PoU: Memastikan bantuan pangan dari pusat (BPN) sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
- b) Aksi Nyata: Memverifikasi data penerima agar bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat berpendapatan rendah yang paling berisiko mengalami undernourishment.





Faktor Pendorong/Keberhasilan

Adapun upaya dalam penanganan masalah sehingga angka PoU semakin membaik ada beberapa kebijakan yang dilakukan, yaitu :

1. Memastikan ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai bagi masyarakat.
2. Melakukan Optimalisasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pangan Bergizi untuk para siswa / pelajar, masyarakat miskin / penerima bantuan sosial.
3. Mengontrol harga bahan pangan di pasaran agar tidak terjadi inflasi.
4. Produksi pangan secara mandiri, seperti pengoptimalan lahan-lahan produktif secara individual di pekarangan
5. Melakukan Kajian/Analisa lanjutan tentang hubungan kemiskinan dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tanah Laut.
6. Strategi jangka panjang peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi secara terpadu.
7. Pengembangan inovasi pertanian modern

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Disrupsi Rantai Pasok: Konflik geopolitik global atau pembatasan ekspor dari negara produsen dapat menyebabkan kelangkaan stok pangan domestik.
2. Perubahan Iklim dan Gagal Panen: Fenomena seperti El Niño atau banjir besar merusak produktivitas pertanian lokal, yang berujung pada lonjakan harga.
3. Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio): Meskipun ketersediaan pangan secara nasional cukup, distribusi pendapatan yang tidak merata membuat sebagian masyarakat tetap tidak mampu menjangkau pangan berkualitas.
4. Kurangnya Edukasi Gizi: Banyak kasus ketidakcukupan konsumsi bukan karena ketiadaan pangan, melainkan kurangnya pemahaman mengenai komposisi gizi seimbang (hanya kenyang karbohidrat, tapi minim protein dan mikronutrien).

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang akan Dilakukan

Adapun upaya dalam penanganan masalah sehingga angka PoU semakin membaik ada beberapa kebijakan yang dilakukan, yaitu :

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

2. Memastikan ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai bagi masyarakat.
3. Melakukan Optimalisasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pangan Bergizi untuk para siswa / pelajar, masyarakat miskin / penerima bantuan sosial.
4. Mengontrol harga bahan pangan di pasaran agar tidak terjadi inflasi.
5. Produksi pangan secara mandiri, seperti pengoptimalan lahan-lahan produktif secara individual di pekarangan
6. Melakukan Kajian/Analisa lanjutan tentang hubungan kemiskinan dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tanah Laut.
7. Strategi jangka panjang peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi secara terpadu.
8. Penggunaan data by name by address yang lebih akurat untuk meminimalisir salah sasaran dalam distribusi bantuan pangan

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi Masyarakat di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 38 ASN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 2.027.103.936,81 dan terealisasi Rp. 1.385.192.107,00 atau sebesar 68,33%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	601.267.718,00	577.098.000,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.235.788.693,76	661.392.374,00
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	26.300.588,56	19.756.000,00
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	163.746.936,49	126.945.733,00
	JUMLAH	2.027.103.936,81	1.385.192.107,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(2.027.103.936,81 \times 100) - 1.385.192.107,00}{(2.027.103.936,81 \times 100)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 99,32\%$$

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	68,33%	99,32%

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	%	2,5	2,5	2,95	2,5	1,88	75,2%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									75,2%

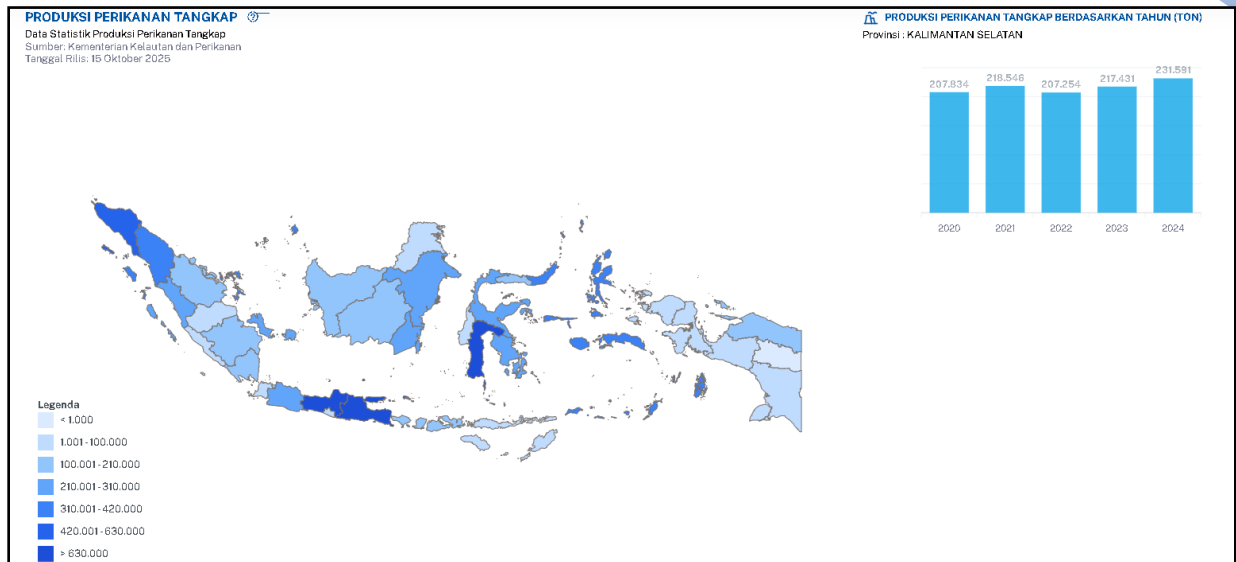
Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	%	2,5	1,88	75,2%	3,4	55,29%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Kotabaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	%	48.594	75.592	221.000	7,85 Jt

*Ket : Perhitungan untuk Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional dalam satuan Ton.



Peta Produksi Perikanan per 15 Oktober 2025

a. Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan

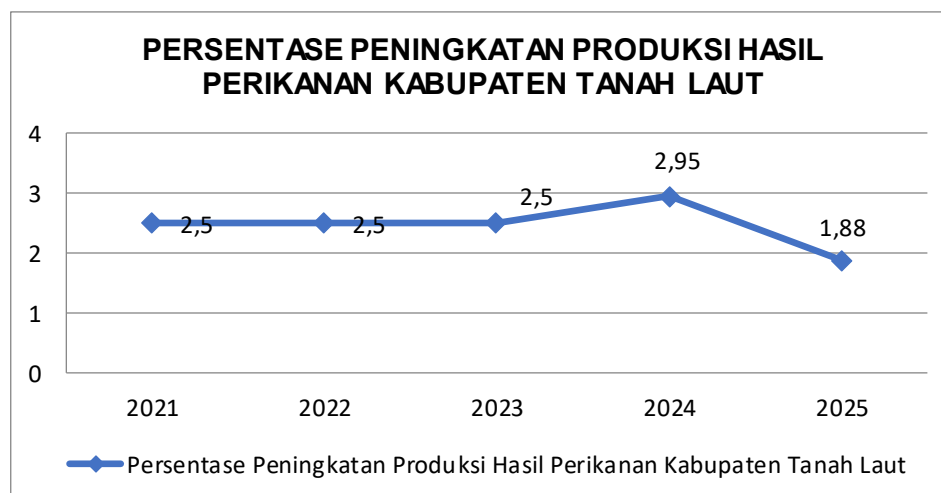
Peningkatan produksi hasil perikanan merupakan indikator vital dalam kemandirian pangan dan penguatan ekonomi biru. Secara naratif, peningkatan ini tidak hanya diukur dari volume tonase yang didaratkan, tetapi juga dari efisiensi proses produksi dari hulu ke hilir. Peningkatan produksi hasil perikanan masa depan akan sangat bergantung pada digitalisasi akuakultur dan kepatuhan terhadap kuota tangkap. Fokus utama kini bergeser dari sekadar kuantitas menuju keberlanjutan (sustainability) agar produksi tetap tinggi tanpa menghabiskan stok sumber daya untuk generasi mendatang.

Penghitungan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tahun } n - 1} \times 100$$

Grafik 3.2.2

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan 2021 – 2025

**1. Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah (Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan yaitu mengalami penurunan yang cukup tajam, dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan" pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,88%, atau setara dengan 75,2% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,5%. Capaian tahun 2025 mencatatkan angka pertumbuhan terendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 2,95%, dengan tingkat pencapaian 118% dan terdapat selisih sebesar 1,07% antara capaian tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

Penurunan dari 2,95% (2024) menjadi 1,88% (2025) mengindikasikan adanya deselerasi dalam produktivitas sektor perikanan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya (2021 – 2023) mampu menjaga stabilitas pertumbuhan di atas angka 2,5%, maka angka 1,88% di tahun ini menunjukkan bahwa ekspansi hasil produksi mengalami hambatan serius. Meskipun angka pertumbuhan tetap positif (produksi tetap bertambah), namun laju kecepatannya melambat. Hal ini mencerminkan bahwa strategi intensifikasi produksi yang diterapkan pada tahun 2025 belum memberikan hasil seoptimal tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 1,88% merupakan sinyal bagi Dinas Ketahanan

Pangan dan Perikanan bahwa diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat produksi. Penurunan di bawah ambang batas rata-rata 2,5% ini memerlukan langkah mitigasi strategis agar pada periode mendatang kita dapat mengembalikan posisi pertumbuhan minimal setara dengan capaian impresif tahun 2024 maupun tahun sebelumnya atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator " Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan " pada tahun 2025 tercatat mencapai 1,88%, yang setara dengan 75,2% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 2,5%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 3,4%, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 55,29% dari target akhir Renstra. Dengan selisih sebesar 1,52 poin dengan target akhir Renstra, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan perubahan penerapan strategi.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,88% dan jika di hitung secara tonase produksi perikanan tercapai sebesar 53.803,93 Ton. Adapun realisasi dari Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional dihitung dengan satuan ton. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu yang mencatat realisasi sebesar 48.594 Ton, dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Kotabaru yang mencatat realisasi sebesar 75.592 Ton, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 5.209,93 Ton dengan Kabupaten Tanah bumbu dan selisih sebesar 21.788,07 Ton. Capaian Kabupaten Kotabaru menunjukkan tingkat capaian produksi yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa penanganan terkait sektor perikanan di kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat realisasi sebesar 221.000 Ton, Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yang lebih signifikan, yaitu sebesar 167.196,07 Ton dan dapat dikatakan Kabupaten Tanah laut menyumbang capaian produksi perikanan sekitar 24,34% dari realisasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan capaian produksi perikanan dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik dapat menjadi fokus utama perbaikan di masa mendatang.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penurunan laju pertumbuhan produksi hasil perikanan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas program kerja dibandingkan tahun 2024:

- a) Terjadinya anomali cuaca yang menyebabkan pola migrasi ikan sulit diprediksi. Hal ini berdampak langsung pada penurunan volume tangkapan nelayan harian dibandingkan tahun lalu yang memiliki kondisi perairan lebih stabil;
- b) Faktor BBM bersubsidi yang tidak maksimal mengakibatkan nelayan membeli di eceran yang harganya lebih tinggi dan berdampak pada biaya akomodasi atau operasional yang semakin melonjak;
- c) Faktor sarana dan prasarana Nelayan atau peralatan yang mulai tidak layak yang mengakibatkan hasil tangkapan tidak maksimal.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan “Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan”, dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan :

- a) Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, diimplementasikan pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Laminasi Kapal Perikanan dengan sasarannya Nelayan Kecil yang memiliki kapal ukuran dibawah 5 GT dan dilaksanakan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur yang pesertanya 20 orang peserta dengan persyaratan wajib memiliki perahu/kapal dan Desa Takisung Kecamatan Takisung yang pesertanya 20 orang peserta dengan persyaratan wajib memiliki perahu/kapal, adapun narasumber dari kegiatan

ini adalah Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Tujuan setelah adanya bimtek tersebut diharapkan memberikan ilmu/menambah pengetahuan kepada nelayan, keterampilan, serta pemanfaatan teknologi dan sarana pendukung usaha perikanan. Upaya ini mendorong nelayan kecil menjadi lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dan dinamika usaha perikanan, kondisi dilapangan banyak kapal nelayan kecil yang sudah tidak layak untuk mendukung penangkapan ikan.



kegiatan pelatihan/bimtek laminasi kapal

- 2) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Pada dasarnya kegiatan ini salah satu penunjang dalam kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap, karena selama ini keterbatasan modal nelayan untuk kelanjutan usaha penangkapan ikan dan operasional dalam melakukan penangkapan ikan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah fasilitasi nelayan dengan perbankan dalam mendapatkan permodalan.
- 3) Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan Dan/Atau Usaha Pengangkutan Ikan, adapun maksud dari kegiatan ini adalah menjaga kondisi perairan

umum darat agar tetap lestari dan memberikan pengetahuan terhadap pelaku usaha nelayan untuk sama-sama menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Implementasi dari kegiatan ini berupa patroli bersama antara pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan pangan Perikanan dengan kepolisian Resort Kabupaten Tanah Laut. Tujuan lain dari kegiatan patroli ini adalah pengendalian kegiatan *illegal fishing/ destructive fishing* dengan cara memberikan sosialisasi maupun pemasangan spanduk larangan atau himbauan menjaga kelestarian ekosistem perikanan.



kegiatan pengawasan dan sosialisasi

- 4) Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dilakukan berupa pemberian sosialisasi/penyuluhan tentang pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) baru. Kegiatan ini bertujuan untuk pemerataan penerima hibah barang pada Program Kegiatan Hibah kepada Kelompok nelayan sehingga kegiatan tersebut mendukung Program penyedia sarana dan prasarana Hibah dan meningkatkan produksi penangkapan ikan, serta otomatis meningkatkan kesejahteraan Nelayan. kendala pemerintah daerah belum mengerti penting Kelembagaan bagi

nelayan kecil sehingga tidak meratanya kelembagan pada lokus daerah pesisir dan PUD, maka dengan adanya kegiatan yang di fasilitasi pemerintah daerah diharapkan pemebrian hibah sarana dan prasarana yang merata dan azas keadilan.



kegiatan pembentukan KUB

- 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil, Kegiatan Saprass Hibah Adalah kegiatan mengatasi Kemiskinan bagi nelayan kecil dan memberikan dampak peningkatkan produksi perikanan tangkap. Permasalahan bagi nelayan kecil banyaknya alat tangkap dan mesin kapal yang tidak layak sehingga berpengaruh kepada hasil tangkapan ikan, banyak proposal nelayan yang belum direalisasikan oleh Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan disebabkan anggaran yang terbatas dan perlu sinergitas dengan anggaran APBD provinsi dan Kementerian, upaya lain yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan memberikan rekomendasi ke Proposal Kelompok untuk di dukung

anggarannya oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.



kegiatan penyerahan bantuan sarpras perikanan tangkap

- 6) Kegiatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan kebijakan di bidang perikanan secara berbasis data. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data potensi serta sebaran sumber daya ikan memberikan dasar informasi yang penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Ketersediaan data yang terstruktur juga mendukung peningkatan akurasi perencanaan program dan kegiatan sektor perikanan.

Pelaksanaan kegiatan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pembaruan data secara berkala, perbedaan kualitas data lapangan, serta keterbatasan sarana pendukung pengelolaan data. Selain itu, integrasi data antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait masih perlu diperkuat agar informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan

mudah diakses. Ke depan, diperlukan penguatan sistem pendataan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan ketersediaan data dan informasi sumber daya ikan yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.



kegiatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan

- 7) Fasilitasi penyaluran solar BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kewenangan yang tertuang pada pasal 7 dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Jenis Bahan Bakar Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, kemudian juga Pemerintah daerah sudah membentuk Tim Terpadu pengawasan solar untuk nelayan, tujuannya setiap aduan masyarakat/nelayan dapat ditindaklanjuti.



kegiatan penyaluran solar BBM bersubsidi

b) Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Pembudidaya Ikan dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil dan peningkatan

produksi perikanan budidaya dilakukan pada 2 (dua) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yaitu Pokdakan Sri Rejeki di Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari dan Pokdakan Sido Mulyo Lestari di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap dengan bantuan berupa benih Ikan Patin dan Nila masing-masing sebanyak 20.000 ekor benih, pakan apung sebanyak 6.240 kg, dan keramba jaring sebanyak 30 unit



kegiatan pemberian hibah sarpras perikanan budidaya

- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pembudidaya Ikan yang dilakukan dengan cara pembagian buku saku budidaya serta pamflet mengenai budidaya komoditas ikan tertentu secara ringkas, kemudian melakukan Sosialisasi pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan pendampingan lapangan secara intensif kepada kelompok pembudidaya/pelaku usaha budidaya bersama-sama dengan Penyuluh Perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pembudidaya ikan dilaksanakan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembudidaya dalam menerapkan praktik budidaya yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan lapangan mendorong pembudidaya untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kualitas air, penggunaan pakan secara efisien, pengendalian penyakit ikan, serta penerapan teknologi budidaya. Upaya ini mendukung peningkatan produktivitas usaha budidaya dan

kualitas hasil perikanan. Adapun kegiatan sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik/Benar (CBIB) dilaksanakan sebanyak 10 kali, ada yang dilaksanakan secara langsung ke kelompok dan ada juga yang langsung ke desa.



kegiatan peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan masih dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman pembudidaya, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi, serta belum optimalnya kesinambungan pendampingan. Selain itu, penguatan kelembagaan pembudidaya dan akses terhadap sarana pendukung usaha

budidaya perlu terus didorong agar peningkatan kapasitas yang dilakukan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas materi pelatihan, penguatan peran penyuluh perikanan, serta integrasi program peningkatan kapasitas dengan dukungan sarana produksi dan akses pasar guna meningkatkan keberlanjutan usaha budidaya ikan.

c) Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan

- 1) Peningkatan kapasitas kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan dengan cara Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) Dimana diberikan pelatihan pengolahan untuk diversifikasi produk olahan selain yang telah dikuasai, antara lain olahan Tahu Bakso Ikan, Nugget Ikan, Dimsum Udang, dan Sempol Ikan. Mendorong untuk meningkatkan penghasilan bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar jika sedang banyak bahan baku yang ada di pasaran dan harga ekonomis, setelah diolah akan meningkat nilai jual produknya. Pelatihan Dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Kali, Pada Desa Swarangan Kecamatan Jorong (10 Juli 2025) dan Desa Tabanio Kecamatan Takisung (24 Juli 2025).



kegiatan kapasitas kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Faktor Teknis & Sarana Prasarana

- a) Ketersediaan dukungan bantuan benih, pakan ikan dan keramba jaring yang merupakan salah satu sarana utama dalam usaha budidaya yang menjadi kunci peningkatan produksi.
 - b) Pendampingan seperti arahan dan musyawarah bersama penyuluh perikanan dalam membantu pelaku usaha/masyarakat dalam menentukan pemilihan lokasi budidaya, sistem budidaya, dan pemilihan komoditas ikan yang dibudidayakan sampai kemudahan pemeliharaan sarana prasarana, pencegahan penyakit serta kemudahan akses panen hingga ke areal kolam.
 - c) Adanya Harmonisasi dukungan Anggaran APBD Provinsi terkait peningkatan sarana dan prasarana Nelayan.
2. Faktor Pemberdayaan & SDM
- a) Pembinaan Kelompok melalui peningkatan kunjungan dan pendampingan dalam rangka pemberian keilmuan secara lebih seksama sesuai dengan kegiatan budidayanya serta Analisa usaha bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) agar bisa mandiri secara manajerial.
 - b) Mendorong penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang memastikan jaminan mutu produk dan layak ekspor serta memiliki daya saing tinggi dengan cara mensosialisasikan pedoman CBIB secara berkelanjutan.
 - c) Sinergitas Penyuluh dan DKPP dalam rangka percepatan Pembentukan Kelembagaan/Kelompok.
 - d) Adanya MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DKPP terkait meningkatkan SDM Nelayan.
3. Faktor Lingkungan & Geografis
- a) Pemanfaatan potensi lahan dan sumber daya air yang sesuai dengan jenis ikan yang dibudidayakan. Memanfaatkan genangan air yang tidak terpakai seperti embung desa atau danau. kegiatan usaha budidaya ikan patin dan nila dengan sistem keramba diharapkan lebih mendukung untuk keberlangsungan usaha karna mudah terhindar dari banjir. Adapun fasilitasi dinas melalui proposal bantuan ke dinas perikanan provinsi terkait kegiatan budidaya bandeng dan udang di daerah pesisir dengan sistem tambak diharapkan bisa terus terjalin melalui kegiatan bantuan prasarana, seperti perbaikan/pemeliharaan tanggul dan pintu air sehingga terhindar dari



- kebocoran/jebol atau banjir rob air laut, dan bantuan sarana seperti bibit bandeng/udang dan juga pakan .
- b) Pengelolaan lingkungan budidaya secara sederhana melalui penggunaan alat kualitas air yaitu pH (Derajat Keasaman) dan DO (Dissolved oxygen) atau oksigen terlarut dalam air.
 - c) Pendataan yang terpadate sehingga dapat melaksanakan arahan pembangunan sektor perikanan yang tepat sasaran.
4. Faktor Strategis & Kebijakan
- Tersedianya alokasi dana yang memadai dari APBD maupun APBN untuk program stimulus/pemicu bagi pembudidaya kecil.

Faktor Penghambat/Kegagalan

- 1. Faktor Ekonomi dan Operasional
 - a) Pembudidaya sering terkendala pada harga pakan ikan yang mahal dan sering menyebabkan pengurangan kepadatan tebar atau bahkan ketidakberlanjutan usaha.
 - b) Akses pembudidaya kecil terhadap lembaga pembiayaan formal masih minim, sehingga skala usaha sulit berkembang.
 - c) Belum Optimalnya dukungan permodalan untuk nelayan dari perbankan.
 - d) Data Produksi Ikan belum terdata secara keseluruhan. dikarenakan nelayan sering menjual hasil tangkapan di tengah laut dan tidak melaporkan hasil penjualannya.
- 2. Faktor Teknis dan Sarana Prasarana
 - a) Keterbatasan fasilitas laboratorium kesehatan ikan, peralatan uji kualitas air, serta sarana prasarana pengolahan.
 - b) Munculnya wabah penyakit ikan yang seringkali menurunkan kuantitas dan kualitas produksi secara signifikan.
 - c) Masih kurangnya pelaku utama (pembibit) yang konsisten menyediakan benih berkualitas di tingkat lokal.
 - d) Penerapan keilmuan berkaitan dengan pakan serta prasarana pengolahan pakan alternatif atau buatan guna menekan biaya produksi.
 - e) Sarana dan prasarana nelayan yang sudah lama atau tidak layak, baik peralatan tangkap maupun kapal.

3. Faktor Lingkungan dan Alam

Fenomena alam seperti banjir akibat curah hujan tinggi atau fluktuasi suhu perairan yang tinggi akibat cuaca yang tidak menentu dapat mengakibatkan nafsu makan ikan berkurang atau bahkan menimbulkan kematian ikan, serta nelayan sulit untuk melaut.

4. Faktor Sumber Daya Manusia dan Administratif

- a) Kurangnya bimbingan teknis/pelatihan bagi pembudidaya serta terbatasnya jumlah penyuluh perikanan atau tenaga ahli strategis di lapangan.
- b) Kendala Administratif: Masalah dalam kelengkapan administrasi calon penerima bantuan atau kurangnya koordinasi lintas fungsi antar-stakeholder yang menghambat penyaluran program stimulus.
- c) Minimnya Adopsi Teknologi: Sebagian besar pembudidaya masih menggunakan metode tradisional dan belum memanfaatkan teknologi modern secara luas.
- d) Sebagian besar nelayan masih belum menggunakan teknologi dalam menangkap ikan atau masih menggunakan metode tradisional.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang akan Dilakukan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, direkomendasikan penguatan sistem perencanaan, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana, serta intensifikasi pendampingan teknis bagi pembudidaya. Adapun aksi yang dapat dilakukan sebagai Langkah strategis ke depan :

1. Optimalisasi Biaya dan Input Produksi

- a) Pengembangan Pakan Mandiri: Bantuan Hibah mesin pakan skala kecil berbasis bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pakan komersial yang mahal.
- b) Bantuan Sarana Prasarana: Memberikan stimulus berupa paket sarana budidaya (bibit, pakan, keramba jaring dan alat uji air) melalui skema pemanfaatan bersama.
- c) Bantuan Sarana Prasarana nelayan berupa alat tangkap, mesin kapal dan kapal kecil.
- d) Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perbankan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan.

2. Penguatan Teknologi dan Inovasi

Adopsi Teknologi Tepat Guna: Menerapkan sistem intensif seperti Bioflok, Recirculating Aquaculture System (RAS), atau penggunaan sistem pemberian pakan otomatis (autofeeder), yang mana tujuan utama dari penerapan teknologi ini adalah efisiensi pakan.

3. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

- a) Intensifikasi Penyuluhan: Meningkatkan frekuensi kunjungan lapangan dan pelatihan teknis terkait mitigasi penyakit ikan serta manajemen kualitas air.
- b) Sertifikasi Unit Usaha: Memfasilitasi pendampingan bagi pembudidaya untuk mendapatkan sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar produk memiliki daya saing tinggi.
- c) Korporasi Pembudidaya: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok besar seperti Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan (Gapokan) agar pembudidaya memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam pengadaan input maupun pemasaran.
- d) Meningkatkan SDM perikanan/nelayan dalam hal penggunaan teknologi yang terbaru dalam hal penangkapan ikan, atau dalam hal lainnya untuk menekan biaya operasional.

4. Mitigasi Risiko Lingkungan dan Iklim

- a) Monitoring Kesehatan Ikan: Memperkuat sarana prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan untuk deteksi dini wabah penyakit ikan seperti pengadaan alat kualitas air untuk tenaga teknis lapangan atau penyuluh perikanan.
- b) Rehabilitasi Lahan: Melakukan perbaikan saluran irigasi tambak atau saluran air baik pemasukan ataupun pengeluaran seperti penggunaan bak kontrol agar air yang masuk ke area budidaya atau keluar dari areal budidaya bisa lebih bersih atau terjamin.
- c) Bekerja sama dengan BMKG terkait pemantauan cuaca dan iklim.

5. Akses Permodalan dan Pemasaran

Fasilitasi Kredit Usaha: Memfasilitasi akses pembudidaya ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau bantuan modal dari dana pemerintah lainnya

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 38 ASN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 3.189.986.487,23 dan terealisasi Rp. 2.132.768.182,00 atau sebesar 66,86%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.678.388.396,39	41.185.358.843
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	752.108.076,00	199.378.015,00
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	651.477.816,52	337.072.984,00
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	108.012.198,32	98.006.100,00
JUMLAH		3.189.986.487,23	2.132.768.182,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(3.189.986.487,23 \times 100) - 2.132.768.182,00}{(3.189.986.487,23 \times 100)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 99,33\%$$

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 2

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	66,86%	99,33%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan anggaran belanja sebesar Rp. 11.972.439.895,71.

Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 433.300.000. dan belanja sebesar Rp. 9.358.541.581, maka jumlah SILPA Tahun Anggaran 2025 posisi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 2.613.898.314,71.

TUJUAN I

Tabel 3.6

Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program					
					Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase		
						Rp	Rp	%		
1	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan	81	79,90	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	601.267.718,00	577.098.000,00	95,98
		2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	4%	3,27%	2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.235.788.693,76	661.392.374,00	53,52
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	26.300.588,56	19.756.000,00	75,12
							Program Pengawasan	163.746.936,49	126.945.733,00	77,53



							Keamanan Pangan			
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	1	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	2,5%	1,88%	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.678.388.396,39	1.498.311.083,00	89,27
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	752.108.076,00	199.378.015,00	26,51
							Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	651.477.816,52	337.072.984,00	51,74
							Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	108.012.198,32	98.006.100,00	90,74

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi			Pagu Anggaran 2025	Realisasi			Kinerja
			Keuangan		Kinerja		Keuangan		Kinerja	
			Rp.	%	%		Rp.	%	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.939.630.661	8.060.428.641	81,09	95,36	6.755.349.471,67	5.840.581.292,00	86,46	95,36	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12.864.746	11.071.502	86,06	100	9.528.096,40	7.214.513,00	75,72	100	
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.826.000	84,88	100	100	6.959.905,40	5.167.000,00	74,24	100	
2	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.245.502	88,03	100	100	2.568.191,00	2.047.513,00	79,73	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.159.952.247	4.698.153.533	91,05	100	5.285.190.729,00	4.722.106.849,00	89,35	100	
3	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.689.309.933	91,06	100	100	5.278.130.419,00	4.716.533.849,00	89,36	100	
4	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.843.600	88,44	100	100	7.060.310,00	5.573.000,00	78,93	100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620.007.750	585.400.000	94,42	97,5	0	0	0	0	
5	5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.400.000	76,97	100		0	0	0	0	
6	6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	570.000.000	95,00	95		0	0	0	0	

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,048,099,517	1.471.919.228	94,15	100	378.709.085,27	345.191.046,00	91,15	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.856.986	10.545.043	70,98	100	16.505.435,40	14.027.000,00	84,98	100
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		443.228.709	416.779.556	94,03	100	110.355.340,62	95.512.373,00	86,55	100
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.948.847	7.697.090	86,01	100	25.855.796,15	19.984.600,00	77,29	100
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13.456.311	7.814.000	58,07	100	19.568.460,00	11.275.830,00	57,62	100
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2,400,000	2,400,000	100	100	4,100,000	4,080,000	99,51	100
12	Penyediaan Bahan/Material		16,100,000	15,000,000	93,17	100	18.009.998,10	16.819.000,00	93,39	100
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		969.961.000	922.925.441	95,15	100	179.350.000,00	178.906.243,00	99,75	100
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.967.375	2.596.000	87,48	100	4.964.055,00	4.586.000,00	92,38	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.979.904.974	745.819.725	37,67	70	159.505.941,00	153.259.810,00	96,08	100
15	Pengadaan Mebel		242.290.800	218.280.000	90,09	100	0	0	0	0
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.737.614.174	527.539.725	30,36	40	159.505.941,00	153.259.810,00	96,08	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		510.621.716	476.211.682	93,26	100	685.267.620,00	386.085.974,00	56,34	100
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		70.700.000	39.045.734	55,23	100	244.800.000,00	41.900.638,00	17,12	100
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		439.921.716	437.165.948	99,37	100	440.467.620,00	344.185.336,00	78,14	100

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184.360.000	158.015.069	85,71	100	237.148.000,00	226.723.100,00	95,60	100
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.000.000	37.098.300	97,63	100	38.500.000	38.431.300,00	99,82	100
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		126.380.000	111.846.769	88,50	100	180.000.000,00	172.321.800,00	95,73	100
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19.980.000	9.070.000	45,40	100	18.648.000,00	15.970.000,00	85,64	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		770.873.271	684.642.828	88,81	100	601.267.718,00	577.098.000,00	95,98	100
8	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		770.873.271	684.642.828	88,81	100	601.267.718,00	577.098.000,00	95,98	100
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		36.746.000	31.615.000	86,04	100	169.091.320,00	147.755.000,00	87,38	100
23	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		290.305.866	237.314.828	81,75	100	432.176.398,00	429.343.000,00	99,34	100
24	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		443.821.405	415.713.000	93,67	100	0	0	0	0
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.414.187.612	974.942.274	68,94	100	1.235.788.693,76	661.392.374,00	53,52	100

9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		412.118.099	123.660.000	30,01	100	89.460.264,08	73.376.100,00	82,02	100
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		386.322.339	102.825.000	26,62	100	45.654.545,95	40.721.000,00	89,19	100
26	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		25.795.760	20.835.000	80,77	100	43.805.718,13	32.655.100,00	74,55	100
10	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		663.056.200	543.612.380	81,99	100	909.335.145,00	369.826.150,00	40,67	100
27	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		604.773.000	502.632.150	83,11	100	857.190.000,00	341.282.250,00	39,81	100
28	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		58.283.200	40.980.230	70,31	100	52.145.145,00	28.543.900,00	54,74	100
11	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		339.013.313	307.669.894	90,75	100	236.993.284,68	218.190.124,00	92,07	100
29	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		20.720.600	20.527.000	99,07	100	17.406.480,00	14.782.000,00	84,92	100
30	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		261.742.358	233.516.534	89,22	100	200.413.811,28	187.363.124,00	93,49	100

	31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	56.550.355	53.626.360	94,83	100	19.172.993,40	16.045.000,00	83,69	100
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		221.114.978	154.087.280	69,69	100	26.300.588,56	19.756.000,00	75,12	100
12	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		221.114.978	154.087.280	69,69	100	26.300.588,56	19.756.000,00	75,12	100
	32	Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	221.114.978	154.087.280	69,69	100	26.300.588,56	19.756.000,00	75,12	100
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		174.123.665	165.612.059	95,11	100	163.746.936,49	126.945.733,00	77,53	100
13	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>		174.123.665	165.612.059	95,11	100	163.746.936,49	126.945.733,00	77,53	100
	33	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	97.008.676	95.450.501	98,39	100	70.673.189,59	61.144.171,00	86,52	100
	34	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	77.114.989	70.161.558	90,98	100	93.073.746,90	65.801.562,00	70,70	100
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1.384.701.288	1.216.234.572	87,83	100	1.678.388.396,39	1.498.311.083,00	89,27	100
14	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		640.725.317	600.233.870	93,68	100	1.524.708.952,00	1.391.841.133,00	91,29	100
	35	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	93.255.174	80.933.533	86,79	100	246.620.159,00	213.720.766,00	86,66	100

	36	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	547.470.143	519.300.337	94,85	100	1.278.088.793,00	1.178.120.367,00	92,18	100
15	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		743.975.971	616.000.702	82,80	100	153.679.444,39	106.469.950,00	69,28	100
	37	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	675.134.382	556.612.022	82,44	100	123.855.473,39	81.443.130,00	65,76	100
	38	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	44.522.803	35.485.940	79,70	100	29.823.971,00	25.026.820,00	83,92	100
	39	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	24.318.786	23.902.740	98,29	100	0	0	0	0
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.469.343.819	1.262.449.868	85,92	100	752.108.076,00	199.378.015,00	26,51	100
16	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>		239.726.550	224.272.238	93,55	100	49.475.848,00	42.802.000,00	86,51	100
	40	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	59.996.954	58.119.188	96,87	100	49.475.848,00	42.802.000,00	86,51	100
	41	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	179.729.596	166.153.050	92,45	100	0	0	0	0
17	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>		1.229.617.269	1.038.177.630	84,43	100	702.632.228,00	156.576.015,00	22,28	100
	42	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.204.622.269	1.013.542.630	97,54	100	702.632.228,00	156.576.015,00	22,28	100



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

	43	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	24.995.000	24.635.000	98,56	100	0	0	0	0
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		121.207.862	117.620.500	97,04	100	651.477.816,52	337.072.984,00	51,74	100
18	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>		121.207.862	117.620.500	97,04	100	651.477.816,52	337.072.984,00	51,74	100
	44	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	121.207.862	117.620.500	97,04	100	651.477.816,52	337.072.984,00	51,74	100
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		115,414,805	144.691.000	86,60	100	108.012.198,32	98.006.100,00	90,74	100
19	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>		167.077.197	144.691.000	86,60	100	108.012.198,32	98.006.100,00	90,74	100
	45	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	167.077.197	144.691.000	86,60	100	108.012.198,32	98.006.100,00	90,74	100
JUMLAH			15.662.260.353	12.780.709.022	81.60	96,15	11.972.439.895,71	9.358.541.581,00	78.17	96,15

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	433.300.000,00	487.200.000,00	-11,06
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	433.300.000,00	487.200.000,00	-11,06
4.1.01	Pajak Daerah	0	0	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	0	0	0	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	250.000.000,00	433.300.000,00	487.200.000,00	-11,06
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.000.000,00	433.300.000,00	487.200.000,00	-11,06
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0	0	0	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0	0	0	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	0	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

4.2.01.05	Dana Desa	0	0	0	
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0	0	0	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0	0	0	
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	0	0	0	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	
5	BELANJA DAERAH	11.972.439.895,71	9.358.541.581,00	12.778.349.022,00	-0,27
5.1	BELANJA OPERASI	11.665.025.215,71	9.069.117.271,00	11.323.212.126,00	-0,20
5.1.01	Belanja Pegawai	5.278.130.419,00	4.716.533.849,00	4.686.949.933,00	0,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.650.067.636,71	2.707.621.372,00	5.061.364.635,00	0,47

5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	
5.1.05	Belanja Hibah	1.736.827.160,00	1.644.962.050,00	1.574.897.558,00	0,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0		
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.665.025.215,71	9.069.117.271,00	11.323.212.126,00	-0,20
5.2	BELANJA MODAL	307.414.680,00	289.424.310,00	1.455.136.896,00	-0,80
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	334.239.800,00	-100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.489.236,00	217.496.310,00	593.357.371,00	-0,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.925.444,00	71.928.000,00	527.539.725,00	-0,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	307.414.680,00	289.424.310,00	1.455.136.896,00	-0,80
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA				
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0	0	0	
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0	0	0	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA	11.972.439.895,71	9.358.541.581,00	12.778.349.022,00	-0,27
	SURPLUS/DEFISIT	(11.722.439.895,71)	(8.925.241.581,00)	(12.291.149.022,00)	-0,27
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	11.972.439.895,71	2.613.898.314,71	2.881.551.331,00	-0,09

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 86,92% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 80%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi E SAKIP sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang;
2. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
3. Meningkatkan edukasi terkait pengurangan ketergantungan pada pakan pabrikan yang harganya fluktuatif dan menggantikan dengan pakan alternatif lainnya untuk menekan biaya produksi;
4. Memberikan bantuan terkait sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan atau regulasi, serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta (CSR) dan perbankan untuk mempermudah akses modal bagi pelaku usaha perikanan;
5. Memfasilitasi terkait pengurusan dokumen kapal untuk memberikan keamanan pada saat melaut dan mendapatkan bahan bakar bersubsidi;
6. Meningkatkan ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk ketersediaan pangan yang merata dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat, serta mengantisipasi disaat terjadinya bencana;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

7. Meningkatkan Kapasitas Pengolahan Hasil dengan memberikan Pelatihan dan bantuan sarana pengolahan produk turunan dengan standar higienis, serta kemasan yang kompetitif untuk mendukung program pengembangan hilirisasi produk unggulan;
8. memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan capaian kerjanya.

Pelaihari, 2 Februari 2026

Kepala Dinas,



MUH. KUSRI, SP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19690315 199803 1 012